

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap berkembangnya Demokrasi di Indonesia serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Dengan adanya sikap demokratis dan keterbukaan bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka tidak memilih bagaikan kucing dalam karung. Bagaimanapun ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan spek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.

Dalam masyarakat modern sekarang partisipasi penuh dan bertanggung jawab terhadap penentuan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara formal diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjangkau para calon kepala daerah yang mempunyai tugas dan wewenang :

1. Memilih Gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.
2. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.
3. Bersama-sama gubernur, bupati, atau walikota menetapkan APBD dan membentuk Peraturan Daerah.
4. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, keputusan gubernur /bupati/walikota, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah, kerjasama internasional, dan berbagai peraturan perundang-undangan pada umumnya.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atas suatu perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
6. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Khusus untuk DPRD Propinsi, termasuk wewenang memilih anggota MPR Utusan Daerah (Bagir Manan, 2001 : 113).

Mengingat pengetahuan masyarakat yang kurang memahami tentang seberapa pentingnya peran masyarakat itu sendiri dalam perkembangan, masyarakat yang notabene sebagai pionir dalam terbentuknya demokrasi. Untuk menimbulkan tingkat partisipasi politik secara aktif, perlu adanya

pendidikan politik yang dapat merubah pola fikir masyarakat terhadap politik. Adanya otonomi Daerah yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah menuntut keaktifan masyarakat terhadap demokrasi.

Membuat rakyat ikut terlibat dalam partisipasi politik pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon Kepala Daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk memaparkan tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan pantar barat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten alor nusa tenggara timur tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun rumusan permasalahan yang ada yaitu Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2014?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2014 adalah: menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2014.

E. Paradigma

Paradigma penelitian ini bersifat Naturalistik karena memandang realita sebagai suatu yang bersifat nyata dapat diamati dengan panca indra. Sudut pandang dalam penelitian ini lebih ditekankan pada bidang pendidikan. Aliran ini, memandang dunia sebagai keutuhan dan dibalik kenyataan terkadang adanya unsur emosi, perasaan dan perilaku tersembunyi yang dapat dimengerti, dipahami, dan dirasakan apabila peneliti benar dalam suasana yang sebenarnya (Basrowi dan Suwandi, 2008: 57).

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik studi kasus karena ada permasalahan yang diteliti, dalam studi kasus yang menjadi objek adalah kasus itu sendiri sehingga dalam penelitian ini objeknya adalah pengaruh tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pantar Barat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2014. Sedangkan fokus utama penelitian ini untuk memaparkan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat setempat karena diketahui bahwa sejatinya nusa tenggara timur merupakan daerah yang berada

jauh dengan pusat ibu kota sehingga pemahaman dan kesadaran politik masyarakat juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan pemilu.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menemukan gambaran yang kongkret tentang partisipasi masyarakat Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Menemukan gambaran yang kongkret tentang tahapan-tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
- c. Menemukan gambaran yang kongkret tentang hambatan-hambatan yang di alami oleh KPUD selaku lembaga penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada masyarakat luas dalam partisipasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.